



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021

Wita Srinofril¹, Febryandhie Ananda²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP

E-mail: witasri2000@gmail.com¹, febryandhie@akbpstie.ac.id²

Abstract. *Capital expenditures are expenditures made in the context of capital formation, namely to increase fixed assets/inventories that provide benefits for more than one accounting period, including expenditures for maintenance costs which aim to maintain or increase the useful life, increase the capacity and quality of assets. The purpose of this study is to find out how much influence Regional Original Revenue and General Allocation Fund have on capital expenditure in 19 regencies and cities in West Sumatra for the 2018-2021 period. The sampling technique used the total sampling method and obtained as many as 76 data. Data were obtained from the Central Statistics Agency for West Sumatra Province through the website www.sumbar.bps.go.id. The analytical method used is panel data regression with the help of the E-Views application. After the Hausman-Test was carried out, it was decided to choose the Fixed Effect Model method. The results of the study show that Regional Original Income has no effect on Capital Expenditures and General Allocation Funds have a Positive Influence on Capital Expenditures.*

Keywords: *Capital Expenditures, General Allocation Fund, Regional Original Incom.*

Abstrak. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yaitu untuk menambah aktiva tetap/persediaan yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan masa manfaat, menaikkan kapasitas serta kualitas barang aktiva. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat periode 2018-2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode total sampling dan di peroleh sebanyak 76 data. Data di peroleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat melalui website www.sumbar.bps.go.id. Metode analisis yang di pakai adalah regresi data panel dengan bantuan aplikasi E-Views. Setelah dilakukannya Hausman-Test maka diputuskan untuk memilih menggunakan metode Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci : Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menerapkan system otonomi daerah (Natania, 2019). Otonomi daerah merupakan hak, wewenang beserta kewajiban bagi daerah agar dapat mengatur dan juga mengurus urusan di pemerintah beserta kepentingan seluruh masyarakat yang berdomisili/tinggal di tempat itu layaknya yang sudah terdapat dan diatur dalam perundang-undangan (Huda & Sumiati, 2019). Otonomi daerah dimulai pelaksanaannya saat tahun 2001 bulan Januari yang menimbulkan reaksi berbeda dengan masing-masing daerah (Pratiwi, 2019).

Belanja Modal adalah belanja pemda yang tingkat manfaatnya melebihi dari satu tahun anggaran. Belanja modal akan meningkatkan asset atau harta kekayaan daerah dan pada gilirannya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim;2004). Belanja Modal hakikatnya sebagai pengeluaran untuk pembentukan modal, namun yang sifatnya menambah investasi yang berdayaguna lebih dari satu periode akuntansi. Dalam hal ini termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang bersifat mempertahankan atau menambah masa interval manfaat dan juga menambah kapasitas dan/atau kualitas aset. (Elvia Pus, 2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000, menerangkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pengalokasian sumber daya dalam APBD ini pemerintah daerah bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif, terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PAS) sebagai panduan (guidance). KUA dan PPAS merupakan perwujudan dari hasil penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka pendek (tahunan), jangka menengah (5 tahunan) dan kebijakan jangka panjang (10 tahunan) yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan.

LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah PAD adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ayem & Pratama, 2018).

Pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan daerah yang dapat mencerminkan kondisi riil daerah serta memberikan kemandirian keuangan daerah. PAD sendiri bisa diartikan sebagai seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD bersumber berasal pajak daerah, retribusi daerah, untung BUMD dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. PAD yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu mendanai kebutuhannya dengan dana yang berasal dari daerah sendiri (bukan bantuan dari pusat), sehingga memberikan dampak pada kemandirian daerah (Machfud et al., 2021).

Pendapatan asli daerah digali dan diperoleh dari potensi pendapatan yang ada di daerah. Berhasil atau tidaknya kemandirian pemerintah kabupaten/kota sebagian bergantung pada pendapatan daerah. Sektor pendapatan daerah merupakan salah satu kriteria yang sangat menentukan tingkat kemandirian daerah di lingkungan otonomi daerah saat ini.(Siregar, 2020).

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa, Pendapatan Asli Daerah ialah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah dan dihimpun menurut peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemasukan atau penerimaan yang diterima oleh kas daerah yang berasal dari sumber-sumber di dalam daerah itu sendiri, dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan digunakan untuk tujuan daerah disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah bermula dari : (Ningrat & Supadmi, 2019).

Tata Cara Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni : Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS), yang dirumuskan :

$$PAD = HPD + RD + PLPD + LPS$$

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

HPS : Hasil Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah PLPD : Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

LPS : Lain-lain Pendapatan yang Sah (Ayem & Pratama, 2018)

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Dalam UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah PAD adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ayem & Pratama, 2018).

Berdasarkan teori dari (Juniawan & Suryantini, 2018) PAD (Pendapatan Asli Daerah) bagian dari pemasukan daerah yang digali dari sumber daya yang tersedia di daerah yang tidak termasuk dana perimbangan dan penerimaan lainnya. Teori dari (Suryani & Patriani, 2018) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan Kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanaii kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (UU Nomor 33 Tahun 2004). Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh dengan melihat dari Dana Perimbangan yang ada di Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah.

Penelitian (Suryani & Pariani, 2018) berpendapat bahwa Hasil penelitian pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal adalah bahwa tidak terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil daerah itu sendiri, misalnya hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan yang Sah. Seperti yang di ketahui bahwa Belanja Modal termasuk dari bagian kelompok belanja langsung merupakan bagian dari belanja daerah. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, maka semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh maka akan semakin besar pula dana yang harus di salurkan lewat belanja langsung untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Namun hal itu belum tentu sepenuhnya terjadi kenaikan pada belanja modal

karena belanja modal hanya bagian dari kelompok belanja langsung dari belanja daerah.

Penelitian Pratiwi (2019) yang berjudul Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Semakin meningkat PAD yang diperoleh maka semakin meningkat pula Belanja Modal daerah tersebut.

Tingginya pencapaian pendapatan asli daerah dapat memajukan kemandirian pemerintah daerah sehingga hal tersebut berimplikasi pada belanja modal, makin tinggi pendapatan asli daerah jadi tingkat ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat dapat makin berkurang. Jika sumber keuangan dapat dimanfaatkan dengan optimal maka dapat meningkatkan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian, maka peneliti menurunkan hipotesis yang akan dibuktikan secara empiris yaitu:

H1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat Positivisme, untuk penyelidikan populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data dengan instrumen penelitian, analisis data kuantitatif atau statistik dengan tujuan menggambarkan dan menguji hipotesis yang diberikan. Pengujian hipotesis adalah dugaan sementara yang tidak mutlak atas pertanyaan penelitian yang derajat kebenarannya belum kuat atau masih diragukan, sehingga dilakukan observasi atau pengujian eksperimental (Sugiyono, 2017).

Metode ini disebut sebagai metode positivistic karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah menemui kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. (Sugiyono, 2013) Margono menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang lebih banyak menggunakan logika hipotesis verifikasi yang dimulai dengan berfikir deduktif untuk menurunkan hipotesis kemudian melakukan pengujian lapangan dan kesimpulan atau hipotesis tersebut ditarik berdasarkan data empiris. (Ahmad, 2009).

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Metode Penelitian Kuantitatif adalah suatu bentuk metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data panel, yaitu informasi yang terdiri dari beberapa mata pelajaran dengan beberapa periode waktu (Rasyid, 2018) Skala yang digunakan yaitu skala rasio yang berupa bilangan dalam arti yang paling murni karena disusun dengan titik nol tertinggi (lurus) sehingga dapat dihubungkan ke semua bentuk operasi numerik (Radjab, E., & Jama'an, 2017).

Data yang diterapkan pada penelitian ini ialah data sekunder, menjadi informasi spesifik yang sampai sekarang ada dan tidak harus dikumpulkan oleh analis sendiri. Informasi yang diuraikan pada perenungan ini bersumber dari arsip laporan Realisasi APBD kabupaten /kota Sumatera Barat diperoleh dari BPS Sumatera Barat yang beralamat JL. Khatib Sulaiman No.48, Padang, West Sumatera, 25135, South Ulak Karang, Padang Utara, Padang City, West Sumatera 25173 dan dalam bingkai informasi online di situs <http://www.bps.go.id/>. (Nailufar & Sufitrayati, 2019).

Data sekunder yang diperoleh adalah laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Dana Alokasi Umum dan Realisasi Belanja Modal yang terdapat di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2018-2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau menguji pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Sumber Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat melalui website.sumbar.bps.go.id. Di mana data tersebut berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal dan Belanja Daerah pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat periode 2018-2021. Data yang di dapat adalah sebanyak 76, yang mana terdiri dari variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal.

Deskriptif Statistik

Statistik deskriptif ini bertujuan untuk menyampaikan acuan terhadap data-data di variabel penelitian yang dipakai dalam penelitian. Selain itu analisis deskriptif dipakai untuk menjelaskan seputar ringkasan sampel penelitian seperti maksimum, minimum, mean dan standar deviasi. Berdasarkan pengujian statistik yang telah dilaksanakan oleh peneliti, diperoleh pengolahan data secara deskriptif seperti yang terlihat di table berikut:

Tabel .1
Deskriptif Statistik

Keterangan	Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum
Maximum	608.641.732,92	889.902.818	1.183.725.491
Minimum	70.002.796,00	23.848.000	352.689.253
Mean	225.418.111,2244737	131.282.486,529079	608.940.600,75
Standar Deviasi	106.254.387,3653042	164.128.618,6887263	196.153.138,9402323
Observasi	76	76	76

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa observasi berjumlah 76 data Belanja Modal yang diambil dari laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat pada periode 2018-2021, menunjukkan bahwa nilai maksimum data sebesar Rp.608.641.732,92 yang terdapat di Kota Padang tahun 2019, nilai minimum adalah Rp.70.002.796,00 yang terdapat di Kota Padang Panjang pada tahun 2021. Rata-rata (Mean) data Belanja Modal sebesar Rp.225.418.111,224 dan Standar Deviasinya Rp.106.254.387,365.

Hasil dari Uji Statistik Deskriptif pada Variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa Nilai Maksimum data sebesar Rp.889.902.818,00 yang terdapat di Kota Padang pada tahun 2021. Nilai minimum adalah Rp.23.848.000 yang terdapat di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2018. Rata-rata (Mean) data Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.131.282.486,529 dan Standar Deviasi Rp.164.128.618,688.

Variabel Dana Alokasi Umum menunjukkan bahwa nilai maksimum data sebesar Rp.1.183.725.491,00 yang terdapat di Kota Padang pada tahun 2020. Nilai minimum adalah Rp.352.689.253,00 yang terdapat di Kota Sawahlunto pada tahun 2021. Rata-rata (mean) data Dana Alokasi Umum sebesar Rp.608.940.600,75 dan Standar Deviasi Rp.196.153.138,940.

Uji Hipotesis

Uji T

Uji t statistic menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen, dilaksanakan untuk memeriksa lebih lanjut apakah variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tersebut signifikan atau tidak terhadap variabel belanja modal, sejauh mana pengaruh variabel penjelas sebagai individu dalam menerangkan varian-varian terkait. Bentuk hipotesis yang dinilai adalah.

H_0 : Ditolak, artinya $T_{hitung} < T_{tabel}$ dan $Prob > 0,05$

H_a : Diterima, artinya $T_{hitung} > T_{tabel}$ dan $Prob < 0,05$

Tabel .2

Pengujian hipotesis (Uji T) dengan Model Fixed Effect Model

Variabel	Koefisien	t-statistik	t-tabel	Prob	Alpha	kesimpulan
Pendapatan Asli Daerah	0,198909	1,162349	1,6660	0,2501	0,05	H1 Ditolak
Dana Alokasi Umum	1,319253	6,217635	1,6660	0,0000	0,05	H2 Diterima

Sumber :Data Sekunder yang diolah dengan Eviews

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai t hitung untuk variabel PAD senilai $1,162349 < t_{tabel} 1,6660$ serta prob $0,2501 > 0,05$ berarti H_1 ditolak artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel PAD terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Nilai t hitung untuk variabel DAU senilai $6,217635 > t_{tabel} 1,6660$ serta prob $0,0000 < 0,05$ berarti H_2 diterima artinya ada pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel DAU terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model regresi dalam memprediksi variabel dependen, koefien determinasi memiliki besaran nilai antara nol sampai dengan satu. Jika hasil pengujian memperoleh nilai R^2 yang mendekati angka satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependennya. Namun, jika pada hasil pengujian memperoleh nilai R^2 yang mendekati angka nol, artinya variabel independen memiliki kemampuan yang sangat baik untuk menjelaskan variasi variabel dependennya.

Tabel .3
Hasil Uji Koefisien Determinan (R²)

<i>R-squared</i>	0,837690
<i>Adjusted R-squared</i>	0,837690

Sumber : Data Sekunder yang dilolah dengan Eviews 10 (2023)

Berdasarkan Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,837690 menjelaskan bahwa kemampuan variasi nilai panel menjelaskan variasi Belanja Modal sebesar 83,76% sedangkan sisanya 16,24% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model atau dijelaskan oleh Indikator lain diluar penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh setelah dilaksanakan pengujian terhadap 76 data observasi yang merupakan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat periode 2018– 2021 bisa disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) membuktikanditolak artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peningkatan jumlah PAD akan menyebabkan peningkatan pada Belanja Modal terhadap Kabupaten/Kota. Dimana PAD tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. PAD merupakan sumber utamapendapatan pemerintah daerah yang berasal dari sumber-sumber kekayaan dalam wilayah atau daerah itu sendiri.

PAD merupakan indikator pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga semakin besar PAD maka akan semakin besar pula belanja modal yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang dapat mencerminkan kondisi riil daerah serta memberikan kemandirian keuangan daerah. PAD sendiri bisa diartikan sebagai seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD bersumber berasal pajak daerah, retribusi daerah, untung BUMD dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. PAD yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu mendanai kebutuhannya dengan dana yang berasal dari daerah sendiri (bukan bantuan dari pusat), sehingga memberikan dampak pada kemandirian daerah (Machfud, 2021).

Pendapatan Asli Daerah didapat dari berbagai sumber hasil pajak yang dipungut pemerintah. Ketika masyarakat yang membayar pajak bertambah setiap tahunnya, otomatis Pendapatan Asli Daerah ikut meningkat. Selain dari pajak daerah, Pendapatan Asli Daerah didapat dari hasil kekayaan yang dikelola oleh pemerintah sehingga Belanja Modal jadi terpengaruh. Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal. Saat Pendapatan Asli Daerah meningkat, itu akan berpengaruh pada daerah tersebut, dimana infrastruktur pemerintah menjadi meningkat dan juga fasilitas publik ikut serta meningkat, dengan begitu Belanja Modal mengalami peningkatan.

Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Suryani & Pariani, 2018) berpendapat bahwa Hasil penelitian pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal adalah bahwa tidak terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil daerah itu sendiri, misalnya hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan yang Sah. Seperti yang di ketahui bahwa Belanja Modal termasuk dari bagian kelompok belanja langsung merupakan bagian dari belanja daerah. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, maka semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh maka akan semakin besar pula dana yang harus di salurkan lewat belanja langsung untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Hipotesis 2 yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semakin besar pengeluaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Dana Alokasi Umum merupakan elemen penting dalam memenuhi alokasi daerah. Penelitian ini untuk variabel Belanja Modal membuktikan bahwa H2 diterimataapi koefisiennya menghasilkan angka positif yang artinya terdapat ada pengaruh yang signifikan antarvariabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Hal ini menjelaskan bahwa, tinggi rendahnya Dana Alokasi Umum tidak mempengaruhi dalam meningkat atau menurunnya Belanja Modal.

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian Juniawan & Suryantini (2018), Natania (2019), Irmansuryani & Retnani (2019) dan Nurnaluri, Husin & Sulis (2020) Adanya pengaruh positif DAU kepada belanja modal dapat memberikan penjelasan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki keterkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah. Keterkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah dapat dikatakan karena bantuan berupa DAU yang dikirimkan dari nasional dan dipergunakan pemda ditujukan untuk mendanai kegiatan atau program pemerintah daerah melalui belanja daerah terutamanya Belanja Modal. DAU yang semakin besar diberikan dari pusat, maka Belanja Modal akan semakin besar yang dianggarkan. Dengan hasil temuan ini menunjukkan pemda berketergantungan dengan dana perimbangan yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah dalam mendanai kegiatan daerahnya.

Dana Alokasi Umum dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam hal memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain daripada itu, DAU bersifat Block Grant yang berarti penggunaannya harus diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum berkaitan dengan belanja modal, karena Dana Alokasi Umum yang diterima pemerintah daerah fungsinya bertujuan untuk mendanai belanja pemerintah daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan publik yang dapat tercipta melalui pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah dan variabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat. Dimana dengan adanya Pendapatan selain Pendapatan Asli Daerah seperti Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang Sah diantaranya : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Dana Desa. Tingginya Pendapatan selain dari PAD tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu mendanai kebutuhannya dengan dana yang berasal dari daerah sendiri, sehingga Pendapatan Asli Daerah tidak memberikan dampak pada Belanja Modal.

2. Dana Alokasi Umum berpengaruh Positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Modal Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat. Artinya bahwa Dana Alokasi Umum memiliki keterkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah. Keterkaitan dengan pembangunan infrastuktur daerah dapat dikatakan karena bantuan berupa DAU yang dikirimkan dari nasional dan di pergunakan pemda ditujukan untuk mendanai kegiatan atau program pemerintah daerah melalui belanja daerah terutamanya Belanja Modal. DAU yang semakin besar diberikan dari pusat, maka Belanja Modal akan semakin besar yang dianggarkan. Semakin baik nilai Dana Alokasi Umum maka semakin meningkat infrastruktur daerah tersebut.

Saran

1. Untuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam hal memungut pajak daerah demi terjadi pula Peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah, dan juga Dana Alokasi Umum agar mampu mengatur keuangan daerahnya masing-masing.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lanjutan dengan memperluas data penelitian. Misalnya dengan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang serta menambahkan variabel independen lain yang diduga mempengaruhi Belanja Modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, T. (2009). Pengantar Metode Penelitian.
- Ayem, S., & Pratama, D. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 2(2), 169–182. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i2.2987>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). Portal data. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Elvia Pus. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2012-2017.
- Jayanti, F. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3), 335–341. <https://doi.org/10.35794/emba.v8i3.30045>
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3), 1255. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i03.p05>
- Machfud, M., Asnawi, A., & Naz'aina, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3423>
- Mansuri. (2016). Modul Praktikum Eviews Pengantar.
- Nailufar, F., & Sufitrayati, S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Kota Banda Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1).
- Ningrat, C. I. N. K., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(3), 1819–1837. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>
- Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.
- Primanda, Novega, R., & Dahlia, E. (2020). Kontribusi dan Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Dan Manajemen*.
- Radjab, E., & Jama'an, A. (2017). Metodologi Penelitian Bisnis. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rahman, F. (2018). ... Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di *Jurnal Akuntansi Dan* http://akuntansi.feb.unila.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/JAK_VOL_23_No.2-Juli-2018.pdf#page=74

- Rasyid, M. (2018). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(5).
- Salma. (2021). Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal di Kabupaten Kuala Kapuas. 4(1), 6.
- Siregar, M. I. C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Papua. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 26–42. <https://doi.org/10.51263/jameb.v5i1.111>
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metode Penelitian*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sugiyono. (2017a). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D* (Sofia Yustiyani Suryandari (ed.); ke-3 Tahun). ALFABETA.
- Sugiyono. (2017b). *Metodologi penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Suryani, F., & Pariani, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, 6(1), 12–22.
- Syukri, M., & Hinaya, H. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(2), 30. <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>
- Winarno, W. W. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews* (4th ed.). UPP STIM YKPN.
- Winarno, W. W. (2017). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews* (5th ed.). Yogyakarta: STIM YKPN.